

INDUSTRI PERTANIAN SEBAGAI *LEADING SECTOR* PEREKONOMIAN NASIONAL

Oleh: Siti Hapsah^{*)}

Abstrak

Indonesia mempunyai dasar pertimbangan yang kuat untuk memberikan prioritas pada pembangunan sektor pertanian. Berbagai kasus yang dialami petani Indonesia, menunjukkan pentingnya pembangunan pertanian yang menghasilkan sektor pertanian yang mandiri, sebagai prasyarat untuk mencegah lestarnya ketergantungan pada negara industri dalam hal pangan. Masalah pembangunan pertanian di Indonesia tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan para petani agar dapat lebih berperan dalam berbagai proses pembangunan. Pemberdayaan petani, harus dipandang sebagai bagian integral kebijakan nasional.

Pembangunan industri pengolahan pertanian menjadi pilihan yang strategis, sehingga nilai tambah hasil pertanian yang besar dapat dinikmati petani, sekaligus meningkatkan produktivitas petani dan menyediakan kesempatan kerja di pedesaan. Supaya kegiatan industrialisasi dapat berkembang dengan baik, maka peranan pemerintah sangat diperlukan dalam memfasilitasi kepentingan petani, Petani dipandang sebagai subjek kebijakan agraria. Pemberdayaan petani, harus bernuansa “gebrakan”, dan perlu adanya political will bahkan political commitment dari pemerintah.

Kata kunci: Industri pertanian, *leading sector*.

^{*)} Dra. Siti Hapsah, M.Si adalah dosen Program Studi Pendidikan Geografi STKIP Bale Bandung.

1. Pendahuluan

Berdasarkan pada pengalaman sejarah, telah dibuktikan bahwa 4 abad yang lalu bangsa/negara kita diperebutkan dan dijajah oleh negara lain karena hasil pertanian: Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah yang tidak ada duanya, ditambah lagi dengan budaya bertani yang telah mengakar di masyarakat, membuat sektor pertanian pada saat itu menjadi andalan (*leading sector*) dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian merupakan tulang punggung pembangunan nasional.

Pada saat ini, meskipun sektor pertanian mengalami kemerosotan, namun sampai sekarang masih mampu tumbuh positif (0,26% pada saat krisis tahun 1998). Artinya bahwa sektor pertanian mempunyai daya tahan yang kuat terhadap krisis ekonomi, dan ini berlanjut sampai tahun 2002.

Bila kita lihat negara-negara maju yang berkembang dengan hasil pertaniannya, seperti halnya Amerika memperoleh devisa dari ekspor hasil pertanian 40%, Malaysia dengan ekspor minyak sawit, Belanda dengan bunga, dsb. Kunci persoalan terletak pada bagaimana kita me"manage" pembangunan pertanian sehingga memberikan nilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Dan tidak mustahil *economic base* pada sektor pertanian akan terwujud.

Yang menjadi pertanyaan, permasalahan dan perlu solusi, adalah mengapa Indonesia ketinggalan jauh?

Jika kita telaah, Indonesia mempunyai dasar pertimbangan yang kuat untuk memberikan prioritas pada pembangunan sektor pertanian. Alasannya adalah, bahwa Indonesia yang diberi kelimpahan potensi lahan, laut dan perairan yang sangat besar. Dengan dasar bahwa manusia akan selalu mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, sedangkan di saat yang sama sebagian negara-negara pertanian mulai bergeser ke sektor industri. Harusnya Indonesia dapat mengisi pasar global untuk produk-produk pertanian. Produk-produk yang dibutuhkan oleh negara lain, sebagian besar merupakan produk unggulan Indonesia. Misalnya saja kelapa sawit, karet, teh, unggas, susu, dll. Tetapi untuk menjadikan sektor pertanian sebagai suatu *leading sector* dalam proses pembangunan bukanlah hal yang mudah.

Jika kita sepakati, bahwa pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, maka semua aspek yang terkait dengan pembangunan pertanian harus disesuaikan termasuk lembaga pemerintah yang menangani pertanian.

2. Menempatkan Pertanian sebagai *Leading Sector* dalam Pembangunan Nasional

a. Kondisi Sosial Budaya Petani

Ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi krisis menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dari para perencana pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Tadinya pada awal abad 21, paradigma pembangunan negara adalah industrialisasi. Dengan tujuan untuk menyejajarkan negara dengan negara-negara yang sudah maju. Namun ketika krisis ekonomi melanda, meruntuhkan industri-industri yang telah dibangun, semua kembali ke semula.

Berdasarkan data statistik yang ada, saat ini sekitar 75% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Lebih dari 54 % diantaranya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dengan pendapatan yang relatif rendah. Hal ini dikaitkan dengan faktor luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif kepada petani, dsb.

Petani di Indonesia banyak yang disebut dengan “petani gurem”. Ini menunjukkan kualitas SDM di sektor pertanian yang masih rendah. Seperti diungkapkan dalam sosiologi Barat, bahwa terdapat dua konsep mengenai petani, yaitu *peasants* dan *farmers*. *Peasants (subsistence farmers)* adalah petani yang memiliki lahan sempit dan memanfaatkan sebagian besar dari hasil pertaniannya untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan *farmers* adalah orang-orang yang hidup dari pertanian dan memanfaatkan sebagian besar hasil pertaniannya untuk dijual, dan *farmers* sudah mengenal teknologi pertanian. Berkaitan dengan petani di Indonesia, maka dapat dogolongkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia adalah masuk dalam kategori istilah *Peasants*. Sehingga hal tersebut menempatkan petani Indonesia pada posisi yang dilematis.

Sebagai akibat dari kondisi tersebut, maka petani Indonesia berada pada posisi sulit, dimana tingkat kesejahteraannya yang rendah

juga tingkat kesulitan yang dialami dalam berinteraksi dengan bank dalam mendapatkan kredit modal.

b. Kendala Mengembangkan Sektor Pertanian

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan upaya pembaharuan, dalam upaya peningkatan hasil pertanian. Namun, suatu kendala tetap ditemukan. Ini lebih dititikberatkan pada suatu kondisi dimana negara kita sebagai negara agraris yang sangat kaya dengan SDA-nya, kini terbawa arus modernisasi dan globalisasi. Dimana kini masyarakat/negara lebih memprioritaskan usaha kepada bidang industri yang sebenarnya belum pada tahap “siap”. Upaya menuju negara industri maju tidak dibarengi dengan keadaan di Indonesia. Sehingga industri yang dipaksakan berjalan “terseok-seok”. Boleh saja kita ikut berlomba untuk menjadikan negara kita sebagai negara industri, tapi industri yang dapat mengoptimalkan sumber daya yang telah ada, yaitu sumber daya pertanian.

Tidak hanya hal tersebut di atas yang menjadikan sektor pertanian tidak bisa dijadikan sebagai *leading sector*. Padahal merunut ke belakang bahwa negara kita sampai sekarang dijadikan ajang perebutan dalam hal SDA-nya.

Banyak kendala yang sebenarnya dulu, sekarang, atau mungkin sampai di masa depan. Kendala yang banyak ditemui petani dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai apa yang harus dilakukan seharusnya. Selain untuk tujuan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, para petani biasanya tidak mempunyai orientasi yang luas. Kendala tersebut pada akhirnya berakibat pada rendahnya produktivitas. Adapun kendala tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan teknologi pertanian, kelembagaan, permodalan, pengolahan dan pascapanen, pemasaran, koordinasi, infrastruktur, informasi, perijinan, lahan, pembinaan dan penyuluhan, dan terakhir kembali kepada kendala kualitas SDM (petani) yang masih rendah.

Hal-hal yang dikatakan menjadi penghambat dalam upaya menempatkan pertanian sebagai *leading sector* dalam pembangunan nasional. Hal ini bukanlah suatu pernyataan yang tanpa alasan. Ini

didasarkan pada suatu fakta yang ada yang dapat kita lihat dan rasakan sendiri.

Kendala yang dialami berkaitan dengan teknologi pertanian, dimana teknologi di bidang pertanian belum berkembang secara baik, sehingga produktivitas pertanian sangat rendah.

Kelembagaan, misalnya KUD, walaupun sudah lama dikembangkan, tetap saja belum optimal. Belum dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani.

Dalam hal permodalan, di Indonesia belum ada institusi yang menjamin pendanaan di sektor pertanian. Lembaga keuangan yang diharapkan bisa membantu petani, ternyata belum berkembang sehingga tidak bisa menjangkau petani secara keseluruhan. Program-program untuk menunjang permodalan pun belum berkembang secara konsisten dan bahkan cenderung untuk dihapus (seperti halnya program kredit dengan bunga rendah).

Pengolahan dan pascapanen. Pada saat ini banyak bahkan sebagian besar hasil pertanian kita tidak bisa mencukupi kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri. Sehingga industri dengan pengolahan skala besar mengalami *undercapacity*. Begitu pula untuk industri dengan skala kecil, yang diharapkan dapat membantu petani, belum berkembang secara signifikan.

Terbukanya pasar merupakan kunci bagi pembangunan pertanian. Namun, sampai saat ini akses petani ke pasar sangat rendah. Lembaga pemasaran pun lebih berpihak pada para pedagang.

Kendala selanjutnya adalah kurangnya koordinasi. Karena bagaimana pun pembangunan pertanian tidak bisa ditangani hanya oleh satu departemen (satu atap saja). Begitu pula dengan infrastrukturnya. Dimana perhatian dalam hal dukungan infrastruktur yang memadai, seperti irigasi, transportasi, listrik, pergudangan, dll. Namun, hal ini belum tersentuh secara optimal. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan pertanian terutama terhadap efisiensi, produktivitas, dan pada akhirnya berpengaruh kepada pendapatan dan kesejahteraan petani. Sebagai contoh: dari aspek transportasi, aspek ini sangat penting dalam upaya penyaluran/distribusi hasil pertanian ke tempat-tempat lain. Jika sarana transportasi tidak memadai apalagi jika

hasil pertanian merupakan barang yang mudah rusak (seperti sayuran), ini akan sangat merugikan khususnya bagi para petani.

Begitu pun dengan kendala informasi. Informasi sebagai sarana untuk memperkecil kendala letak/batas-batas geografis, pada saat ini belum banyak menyentuh sektor pertanian terutama di tingkat petani. Akibat dari adanya kendala ini menyebabkan sebagian dari data/informasi yang diperlukan terutama oleh para investor sangat sulit diperoleh dalam rangka investasinya. Informasi mengenai potensi pasar, persyaratan negara importir, proses ekspor/impor dan investasi masih sulit diperoleh masyarakat dan dunia usaha.

Masalah perijinan untuk melakukan usaha (impor/ekspor) hasil pertanian, selain dirasakan memerlukan waktu lama, juga biaya yang cukup besar dibandingkan dengan negara lain. Menyebabkan petani Indonesia kalah bersaing dengan petani-petani luar.

Lahan yang semakin sempit, sekarang menjadi permasalahan utama penyebab rendahnya tingkat pendapatan petani. Berdasarkan BPS di Indonesia, lebih dari 70% petani tidak memiliki sertifikat atas tanah yang dikuasainya. Sehingga para petani sulit untuk berinteraksi dengan perbankan. Sementara itu banyak lahan yang dikuasai oleh pengusaha/konglomerat dibiarkan terlantar, menjadi tidak produktif. Jauh sekali dengan keadaan di negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, Philipina dan Taiwan, dimana pemerintah melakukan *agrarian reform*. Seperti halnya di Taiwan, pemerintah membeli tanah para tuan tanah/pengusaha yang kemudian dibagi 2-5 ha untuk petani dengan sistem/mekanisme yang telah diatur dan disepakati.

Kembali pada penanganan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah kendala yang berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan. Mengingat rendahnya tingkat aksesibilitas, keterjangkauan oleh infrastruktur dan informasi yang rendah pula. Mengisyaratkan perlu adanya sistem pembinaan dan penyuluhan yang efektif dan efisien. Untuk sekarang ini, di era otonomi telah ada pembangian tugas antara pusat dengan daerah. Namun, bukan berarti dengan adanya pembagian tugas ini mengakibatkan pekerjaan menjadi mudah. Muncul permasalahan baru bahwa di dalam kebijakan hubungan pusat dan daerah dalam pembinaan pembangunan pertanian, daerah cenderung

mengoptimalkan pengembangan kebijakan dan program semata-mata untuk kepentingan daerah tanpa memperhatikan dampaknya secara luas (nasional). Di lain pihak, pusat mengalami kesulitan untuk melakukan pengaturan secara nasional, karena terikat dengan UU otonomi.

Kendala terakhir yang sering dipermasalahkan sebagai kendala terbesar adalah kualitas SDM yang masih rendah. Lebih dari 80% petani di Indonesia tidak tamat SD. Sehingga dengan rendahnya kualitas masyarakat pertanian kita, berdampak pada rendahnya pula kualitas segmen kegiatan pembangunan pertanian seperti pada pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian. Dan pada akhirnya kemampuan untuk bersaing di pasaran bebas pun menjadi rendah.

Beberapa waktu lalu, pernah ada suatu gebrakan, yaitu yang disebut dengan Revolusi Hijau merupakan paradigma dalam modernisasi pertanian yang bertujuan mengubah sektor pertanian tradisional ke sektor pertanian modern yang mampu meningkatkan produksi sektor pertanian. Namun program ini dalam implementasinya, mengalami kendala, dan akhirnya mengalami kegagalan. Kendalanya adalah penggunaan teknologi yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Kendala serupa bisa kita atasi jika kebutuhan *financial*, khususnya petani tercukupi. Petani mempunyai kemampuan dalam hal *financial*, perangkat teknologi optimal, produktivitas petani meningkat, mutu dan hasil pertanian pun meningkat, sehingga kesejahteraan petani pun meningkat. Namun, ini merupakan suatu *vicious cycle*. Pada saat itu kondisi *financial* petani tidak memadai. Pada akhirnya harapan tidak tercapai.

c. Upaya yang Dilakukan

Mengingat kondisi di Indonesia, dimana 80% pertanian di Indonesia dikembangkan oleh petani (termasuk nelayan dan peternak kecil, yang sebagian besar berada di tempat terpencil dan terpencar di pedesaan), sehingga perlu dibuat suatu strategi. Dimana strategi itu perlu diingat pula bahwa dengan keberadaanya yang terpencil di pedesaan, menimbulkan berbagai kendala seperti yang diutarakan pada bab sebelumnya.

Dengan banyaknya kendala yang dialami, khususnya pada sektor pertanian, menuntut kita untuk melakukan upaya secara total dengan

dukungan semua pihak. Salah satu upaya dalam menempatkan pembangunan pertanian sebagai *leading sector/economic base* dalam pembangunan nasional adalah dengan menempatkan pertanian dalam GBHN. Penempatan tersebut bukan hanya sebagai sektor pendukung, tetapi menempatkan pembangunan pertanian dalam GBHN, diharapkan bahwa dengan adanya *statement* politik ini dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijaksanaan makro ekonomi yang berpihak dan memberikan prioritas pada pengembangan pertanian yang didukung oleh sektor lain dalam pembangunan.

Upaya lain adalah dengan adanya konsolidasi secara kelembagaan, restrukturisasi, dan reorganisasi. Adanya koordinasi yang jelas, keterpaduan visi dan misi ke dalam satu kesatuan kebijaksanaan, program perencanaan dan pengendalian pada sektor pertanian, sehingga tercipta kesatuan gerak langkah. Struktur organisasi pemerintahan di sektor ini harus lebih dapat menjangkau seluruh aktifitas, wilayah, komoditas dan seluruh pelaku agribisnis. Tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*).

Kembali berbicara mengenai SDM, bahwa SDM pertanian tidak hanya mencakup SDM Departemen Pertanian dan petani saja. Tetapi juga terkait dengan *stake holder* (yang didalamnya termasuk unsur-unsur pemerintah baik pusat maupun daerah), SDM pada instansi terkait, para mitra pertanian, seperti Bappenas dan koperasi. Dengan bersatunya semua unsur, menciptakan suatu kondisi yang simultan dan secara bersama-sama mampu mendorong dan mempercepat proses pembangunan pertanian.

Adanya konsolidasi pemilikan dan distribusi faktor produksi, terutama lahan. Karena bagaimanapun hebatnya SDM, teknologi dan yang lainnya, tanpa lahan apalah artinya. Walaupun sekarang sudah ditemukan teknologi pertanian tanpa lahan. Sebagian besar petani kita, terutama di Jawa memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, dan petani kita lebih kepada sebagai penggarap. Sehingga dengan kondisi tersebut, sangat sulit untuk menuju pertanian yang ekonomis dan mampu mensejahterakan petani dan keluarganya. *Land reform/agrarian reform* barangkali harus dilakukan seperti halnya di Taiwan dan nagara lain, sehingga akumulasi dan fragmentasi pemilikan tanah dapat diminimalkan.

Begitu pula konsolidasi pada faktor produksi seperti teknologi, pupuk, benih, pestisida, dll, harus dilakukan membantu petani dalam mengakses segala kebutuhannya. Diharapkan dengan memperkuat input pertanian dapat menjadi landasan dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani.

Modernisasi pertanian melalui teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, mungkin bisa kita kembangkan sekarang ini. Karena saat ini di negara mana pun, pasti mempunyai impian dan harapan menjadi negara industri yang modern. Barangkali dengan teknologi tersebut dapat menjadi suatu jawaban untuk mewujudkan pertanian modern, efisien, produktifitas tinggi, mutu bersaing dan terjaminnya kontinuitas *supply* dan *demand*. Pengembangan teknologi di sektor pertanian menjadi suatu tuntutan dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Pada saat ini, pada masa otonomi daerah, dimana kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah, menuntut penguatan institusi perencanaan pembangunan pertanian di daerah. Dengan penyerahan kewenangan ini diharapkan tingkat akurasi perencanaan adalah dengan adanya:

- (1) Pengembangan koperasi, UKM, dan kemitraan; dengan adanya penghimpunan usaha tani kecil di seluruh pelosok desa, koperasi-UKM melakukan kemitraan dengan usaha berskala besar dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pengembangan kelembagaan dan assosiasi petani; dengan harapan bahwa dengan adanya lembaga ini dapat menjadi lembaga advokasi dan *pressure* dalam penyusunan kebijakan di sektor pertanian.
- (3) Pengembangan industri berbasis pertanian. Nilai tambah hasil pertanian terletak pada proses pengolahan, distribusi dan pemasaran. Dan diharapkan untuk masa mendatang Indonesia tidak hanya mengekspor hasil pertanian dalam bentuk mentah, tetapi lebih kepada *final product*, untuk membuat nilai tambah yang lebih besar.
- (4) Penguatan politik pertanian, perlu dilakukan karena sangat berpengaruh kepada perilaku *supply* dan *demand* atas hasil

pertanian. Mengingat kita sebagai negara berkembang sering mendapat *pressure* dari negara-negara maju, adanya *unfair treatment*/diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan harga dasar pasar dan keleluasaan/perijinan untuk masuk ke negara luar.

Berdasar pada upaya-upaya tersebut di atas, maka semua harus berada dalam suatu koordinasi yang mantap dalam membuat program-program yang berkaitan dengan sektor pertanian. Adapun program-program yang bisa dilakukan secara konkrit, *realible* dan *workable* yang bisa dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan. Program-program tersebut, diantaranya meliputi:

- (1) Program peningkatan produksi sebagai dasar dari pembangunan pertanian. Untuk mendorong peningkatan produksi hasil pertanian baik jumlah maupun mutunya. Tujuan dari program ini antara lain: dalam upaya 1) mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional, khususnya beras; 2) meningkatkan volume ekspor hasil-hasil pertanian, sekaligus substitusi impor; 3) menyediakan bahan baku industri pengolahan; dan 4) mewujudkan diversifikasi pangan dan gizi.
- (2) Program pengembangan SDM, melalui 1) berbagai pelatihan, penataan tenaga, penataan sistem penyuluhan, pemagangan dan studi banding bagi petani dan pelaku agribisnis; 2) pengembangan inkubator agribisnis; 3) sosialisasi program dan kebijaksanaan bagi instansi mitra pertanian; dan 4) penguatan tenaga-tenaga peneliti terutama di bidang budi daya, bioteknologi, pascapanen, mutu hasil, dll.
- (3) Program pengembangan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang urgen, dasar dan mendesak; rehabilitasi, mobilisasi dan peningkatan mutu sarana dan prasarana di seluruh wilayah dalam rangka optimalisasi; dan lebih mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses oleh semua instansi agribisnis.
- (4) Program pengembangan usaha dengan maksud untuk merangsang meningkatnya investasi pada sektor agribisnis, berkembangnya kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan, peningkatan mutu hasil, pengembangan asosiasi-asosiasi komoditas dan profesi

agribisnis, sistem informasi pasar, penguatan jaringan pasar sehingga dapat mengembangkan kerjasama regional dan antar bangsa.

- (5) Program pengembangan teknologi pertanian, yang berhubungan dengan rekayasa dalam sektor pertanian. Dilakukannya berbagai penelitian dalam upaya peningkatan jumlah dan kualitas hasil pertanian.
- (6) Program penataan asset dan kelembagaan pertanian, ditujukan untuk perluasan lahan pertanian, dan terutama penataan pola distribusi sarana produksi seperti pupuk, benih, dll. Program ini bisa dilakukan dengan inventarisasi dan pemetaan asset dan faktor produksi pertanian, baik jumlah, mutu, lokasi dan sifatnya; pengadaan dan redistribusi/relokasi asset dan kelembagaan untuk mendorong optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi; dan bisa dilakukan pula modernisasi asset dan kelembagaan pertanian.
- (7) Program peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran, berkaitan dengan industrialisasi pertanian dan penanganan pascapanen.
- (8) Program pembangunan pertanian di wilayah terpencil, yang sulit tersentuh tangan-tangan ahli. Dapat dilakukan dengan penataan tata ruang pembangunan pertanian di daerah tersebut. Sehingga dapat dipromosikan adanya peluang investasi, inventarisasi dan identifikasi potensi pertanian yang tersedia di wilayah tersebut.

3. Strategi Menuju Pembangunan Pertanian Masa Depan yang Berbasis Industri

a. Pengembangan Industri Berbasis Pertanian/Agroindustri

Tidaklah mungkin kita dibanjiri dengan produk luar, jika industri kita dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Kita dapat bersaing dalam produk pertanian, jika terpenuhi:

- a. Kualitas, minimal sama dengan produk impor. Terlebih jika melebihi kualitas luar, kita akan dapat bersaing dalam jangka panjang;

- b. Efisiensi produk, yang bermuara pada harga yang lebih rendah dari harga impor, yang tentunya harus dengan kualitas tinggi; dan
- c. Kontinuitas supply dan tersedia di pasaran setiap saat, sehingga konsumen dapat mengaksesnya/mendapatkannya dengan mudah.

Ketiga hal di atas dapat dikaitkan sebagai daya tangkal terhadap semakin maraknya barang/produk dari luar yang sebenarnya sangat merugikan bagi industri kita yang pada umumnya kalah bersaing. Sehingga timbul kecintaan masyarakat kita terhadap produk luar negeri terlepas dari masalah harga dan kualitas. Satu upaya harus kita lakukan untuk menumbuhkan kembali kecintaan terhadap produk dalam negeri, pengertian melalui kampanye dan sosialisasi untuk menciptakan kebanggaan terhadap produk dalam negeri.

Satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa jika kita ingin mensejahterakan masyarakat, maka pembangunan industri pengolahan pertanian menjadi pilihan yang strategis, sehingga nilai tambah hasil pertanian yang besar dapat dinikmati petani, sekaligus meningkatkan produktivitas petani dan menyediakan kesempatan kerja di pedesaan.

Supaya kegiatan industrialisasi dapat berkembang dengan baik, maka peranan pemerintah sangat diperlukan dalam memfasilitasi kepentingan petani, juga dengan adanya dukungan dari aspek bahan baku, teknologi dan pasar yang dapat diakses. Misalkan saja jika di setiap kabupaten dibangun minimal 2-5 unit pengolahan, maka jika ada 200 kabupaten, akan terbentuk 400-1000 unit. Kalau setiap unit mengelola 5-10 subunit pengolahan maka akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar di pedesaan, di samping dapat mengoptimalkan hasil pertanian di pedesaan.

Hasil pertanian juga tidak hanya dapat digunakan dalam mencukupi kebutuhan industri dalam negeri saja, tetapi kita juga dapat menjadi pemasok bagi negara-negara industri lain.

b. Memperkuat Ketahanan Pangan pada Sektor Beras

Terdapat beberapa alasan mengapa beras penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Diantaranya:

- (1) Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yang harus tersedia setiap saat;
- (2) Penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, sehingga perlu tersedianya beras secara lokal dan tidak bisa bergantung pada impor;
- (3) Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan pola penduduk yang tersebar, sangat potensial rawan pangan pada daerah tertentu;
- (4) Surplus beras yang diperdagangkan di pasar internasional hanya sedikit, sehingga jika terjadi kekurangan *supply* di pasar internasional, akan menyebabkan negara importir seperti Indonesia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi pasokan beras;
- (5) Ditinjau dari sosial budaya, masyarakat Indonesia mengonsumsi beras memiliki nilai sosial lebih tinggi dibanding dengan bahan pangan lainnya. Sehingga dapat diprediksikan kebutuhan beras akan terus meningkat; dan
- (6) Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani padi, sehingga nasib mereka sangat ditentukan oleh pembangunan perberasan.

Karena sangat besarnya peranan beras dalam masyarakat kita, sehingga menjadi tolok ukur bagi kestabilan sosial ekonomi dan politik nasional. Ketahanan pangan nasional tergantung dari sukses tidaknya penanganan beras. Seperti kita ketahui, pada masa orde lama, ditandai dengan citra antri bahan pokok terutama beras. Pada orde baru ditandai dengan kerusuhan sosial dan penjarahan termasuk penjarahan padi di sawah. Begitu pula pada masa reformasi, masih berkaitan dengan masalah beras, dimana masa ini ditandai dengan bagi-bagi beras yang disebut dengan Raskin.

Pada saat ini tercatat bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada pertumbuhan produksi beras nasional. Hal ini seharusnya menjadi pendorong bagi kita untuk bersama-sama berupaya meningkatkan produksi beras dengan mengoptimalkan sistem agribisnis. Memandang serius masalah pembangunan sistem agribisnis perberasan

nasional. Adapun strategi yang bisa dilakukan sebagai suatu terobosan, adalah adanya:

- (1) Koordinasi kebijakan, program dan pembinaan pembangunan perberasan dari hulu sampai ke hilir;
- (2) Intervensi dari pemerintah mengenai kepemilikan lahan dan kesejahteraan petani;
- (3) Perhatian dari pemerintah berkaitan dengan distribusi dan ketersediaan beras di BULOG untuk menjaga harga tetap stabil;
- (4) Ketergantungan masyarakat pada beras sebagai bahan makanan pokok. Sehingga ada kecenderungan bahwa diversifikasi pangan akan maksimal, jika kebutuhan akan beras sudah terpenuhi; dan
- (5) Adanya perhatian yang lebih pada daerah sentra beras, sehingga adanya tolok ukur keberhasilan beras dilihat dari perkembangan perberasan di daerah tersebut.

c. IPTEK Pertanian, sebagai Salah Satu Solusi

Masalah produksi terkait dengan produktivitas yang rendah, teknologi dan benih, dsb. Hampir semua komoditas pertanian kita berada pada tingkat rendah jauh dari produktivitas potensial.

Kita tentu bertanya-tanya, mengapa hal itu terjadi? Dan tentu saja banyak pendapat yang terlontar, tapi pada intinya jika kita tertekan pada titik terendah, maka akibatnya akan sangat fatal pada perekonomian negara kita. Karena itu, jadilah tugas kita semua bersama dengan pemerintah untuk mendorong terciptanya teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas.

Sebagai ilustrasi, berdasar perhitungan kasar dari salah satu konsultan *warehouse system*, Indonesia mengalami kerugian 2 trilyun rupiah per tahun, kehilangan hasil pascapanen padi yang mencapai 20,5%/tahun. Bisa dibayangkan betapa besar kerugian di sektor pertanian akibat lemahnya pemanfaatan teknologi.

Untuk mengatasinya, bukanlah hal yang salah, jika kita mengadopsi teknologi yang ada di luar negeri sepanjang selaras dengan keadaan dan kepentingan kita. IPTEK pertanian sudah menjadi kebutuhan dan keharusan untuk dikembangkan dalam rangka pencapaian sasaran

pembangunan pertanian. Adapun sosialisasinya dapat dilakukan dengan penyuluhan.

4. Paradigma Baru

a. Infrastruktur Jaringan Informasi Internet Pertanian

Globalisasi pada abad ke-21 tidak sekadar terbatas pada petani harus menanam tanaman ekspor, melainkan perubahan total dalam lingkungan tata niaga produk pertanian di dunia, di samping perubahan-perubahan lain yang menyangkut masalah proses alih teknologi pertanian. Masalah penguasaan teknologi pertanian, khususnya oleh para petani di negara-negara berkembang, menjadi sangat kompleks karena globalisasi menetapkan aturan main baru yang membuat proses transfer teknologi. Globalisasi mengatur transfer teknologi berdasarkan mekanisme pasar.

Pada saat ini, dimana media informasi sudah sangat canggihnya. Bolehlah kita berkhayal, kalau petani kita membuka situs-situs pertanian sebelum mereka pergi ke sawah. Dapat kita bayangkan, jika suatu hari petani di suatu desa membajak sawah dengan robot traktor yang menggunakan *remote control*. Menurut penulis, hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil akan terjadi. Namun, bagaimana jalan untuk menuju kesana? Perlu untuk diupayakan dari sekarang. Setidaknya beberapa petani di suatu daerah harus mengetahui berbagai informasi aktual tentang pertanian, sehingga bisa menyampaikan secara luas informasi yang diperolehnya untuk dilakukan dalam pengelolaannya. Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan dengan segala kemudahan pengaksesan informasi.

Sejak tahun 1990-an, teknologi jaringan komputer yaitu internet telah berkembang dengan pesat, perkembangan tersebut karena adanya dukungan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi multimedia memungkinkan pengguna komputer dapat menerima informasi, baik berupa teks, gambar, suara, dsb. Pada saat itu, tidak akan ada lagi para penyuluh yang pergi ke desa. Dalam suatu Group Akses, cukup dengan duduk di depan komputer, *browsing* menggunakan *searching* melalui LacakTani dari google atau yahoo.

Dengan adanya teknologi jaringan komputer, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dapat diakses menggunakan komputer. Berbagai

model infrastruktur jaringan komputer dapat dilakukan melalui jaringan media transmisi. Yang mungkin dilakukan sekarang hanya mungkin dengan menggunakan transmisi jaringan listrik, karena hampir semua desa sudah ada jaringan listrik masuk, dan dianggap paling murah di banding dengan media transmisi lainnya.

Pembangunan infrastruktur ini mungkin dirasa masih sangat sulit untuk dilakukan, namun jika infrastruktur jaringan telepon dan listrik telah tersedia, hal itu bukan hal yang sulit. Tentunya dengan kerja sama. Pemerintah pusat, terutama pemerintah daerah harus secara aktif berinisiatif membangun infrastruktur ini, sebagai pemicu “melek” teknologi di kalangan petani.

b. Pertanian Organik sebagai pertanian Alternatif yang Bernilai Ekonomis Tinggi

Terdapat juga suatu terobosan yang dapat kita lakukan, mengingat bahwa masyarakat di dunia industrial sangat peduli dengan kesehatan mereka. Sehingga mereka akan lebih banyak mengkonsumsi produk pertanian yang bebas kandungan zat kimia. Terobosan tersebut sekarang kita sebut sebagai pertanian organik, yang dapat menjadi pertanian alternatif di abad 21. Pertanian ini sebenarnya sudah dilakukan di negara kita, salah satunya dilakukan oleh salah satu artis kita yaitu Melly Manuhutu. Dengan terobosan ini, dipandang mempunyai prospek ekonomis yang tinggi, seiring dengan berubahnya pola konsumsi manusia yang lebih mengutamakan kesehatan walau dengan biaya yang tinggi.

Pertanian organik sulit untuk dibudidayakan, karena memerlukan ketelitian dan ketekunan yang tinggi, namun, ternyata dengan dikurangi pemakaian zat kimia mengakibatkan tanaman memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit. Terutama pada tanaman padi. Hasil pertanian organik masih sangat mahal karena keterbatasannya dalam kuantitas, juga perawatannya yang harus intensif. Hasil pertanian ini menjadi sangat didambakan masyarakat yang sadar akan kesehatannya, terutama masyarakat di negara maju. Sehingga pertanian ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor hasil pertanian kita.

5. Penutup

Dengan berbagai kasus yang dialami petani Indonesia, menunjukkan pentingnya pembangunan pertanian yang menghasilkan sektor pertanian yang mandiri, sebagai prasyarat untuk mencegah lestarinya ketergantungan pada negara industri dalam hal pangan. Belajar dari hal tersebut, maka pemerintah harus bertindak cepat dengan membuat suatu program yang mendukung konservasi sumber daya genetika oleh petani setempat; pengakuan atas hak petani; adanya program pelatihan bagi petani agar mereka mampu menjadi penangkar dan produsen bibit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani; antar negara berkembang secara bersama-sama berupaya untuk mencegah berlakunya UU Hak Paten yang memberi hak paten atas setiap penemuan teknologi atau bibit baru bagi petani.

Masalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu hal yang seharusnya. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas SDM yang akan menunjang pada berbagai upaya yang dilakukan. Peningkatan SDM tidak dibatasi pada peningkatan produktivitas semata, tetapi juga pada peningkatan kemampuan para petani agar dapat lebih berperan dalam berbagai proses pembangunan.

Suatu terobosan perlu dilakukan untuk adanya suatu sistem ketahanan pangan bagi negara-negara berkembang, pemanfaatan kekayaan alam yang berupa plasma nutfah, dan juga tidak kalah penting, yaitu adanya pengakuan atas hak para petani.

Gagasan perlunya pembaharuan, ditemui dalam TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 yang menyatakan, MPR RI mempunyai tugas konstitusional menetapkan arah dan dasar pembangunan nasional yang dapat menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan mewujudkan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan SDA. Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang ada dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan komitmen politik. Pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi, peran serta masyarakat dan menyelesaikan konflik.

Pemberdayaan petani, harus dipandang sebagai bagian integral kebijakan nasional. Petani dipandang sebagai subjek kebijakan agraria.

Pemberdayaan petani, harus bernuansa “gebrakan”, dan perlu adanya *political will* bahkan *political commitment* dari pemerintah.

Ada warisan sejarah yang berharga dari pidatonya Soekarno (1952), yang berjudul “ Soal Hidup atau Mati”. Maknanya adalah memandang pertanian sebagai masalah nasional yang menentukan eksistensi negara. Artinya memposisikan pertanian dalam konstelasi politik untuk cita-cita kemerdekaan.

Daftar Pustaka

Biro Pusat Statistik. 2000. *Sensus Pertanian*.

Tani Lestari, 1998, *Aneka Ragam Hayati: Kekayaan dan Kekuatan Petani* dalam: Media Komunikasi-Informasi dan Motivasi Petani dan Nelayan Lestari. No. 3 Th. VI Oktober.

Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM, 1998, *Kajian Pembangunan Pertanian Abad ke-21 Sistem Pertanian Berkebudayaan industri dan Strategi Operasional Repelita VII*. Yogyakarta.